

# IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DI KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:  
**MIRDAYANTI**  
NIM. E21111109

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Tanjungpura Pontianak, 2015

Email: [Mirda25@yahoo.com](mailto:Mirda25@yahoo.com)

## Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai”. Identifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu pembangunan infrastruktur yang masih kurang memadai dan usaha-usaha kecil yang masih kurang berjalan secara optimal. Hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan ternyata implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai belum terlaksana dengan optimal. Hal ini karena sumber daya keuangan dalam pendanaan kegiatan pembangunan yang terbatas dan sangat bergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Sebagai contoh pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pintu irigasi dan jalan rabat beton belum terlaksana sepenuhnya, permodalan untuk usaha-usaha kecil juga belum berjalan optimal. Namun sejauh ini pembangunan dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai secara umum sudah berjalan dengan baik mengingat dengan keterbatasan yang ada masyarakat bersama-sama dengan fasilitator kecamatan telah mengerahkan segala kemampuan untuk melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan. Melalui penulisan Skripsi ini juga diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur di perdesaan melalui PNPM Mandiri Perdesaan dengan menyediakan bantuan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat di desa, sementara itu jalinan kerjasama dan komunikasi yang telah terbangun dengan baik antara fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dan masyarakat desa agar tetap dipertahankan dengan baik dalam rangka melaksanakan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai

Kata-kata kunci: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Perdesaan, Sumber Daya Pendanaan.

## Abstrack

This thesis writing is intended to give an understanding about “The Implementation of PNPM Mandiri Pedesaan at Teluk Pakedai Subdistrict”. The problems in this research are the poor quality of facilities installment and low budget businesses which are running in a poor condition. Based on the result of this research, the researcher concludes that the implementation of PNPM Mandiri Pedesaan at Teluk Pakedai Subdistrict is categorized as less than optimal. The reason behind the result is the limited funds of facility installment, because the source of the funds is only from the government who are using stricted rules. For examples, the installment of water irrigation gates and the roads, are not finished yet. The low budget businesses are also running in a poor condition. But so far, the implementation of PNPM Mandiri Pedesaan at Teluk Pakedai Subdistrict has been conducted quite well, in an optimal collaboration between the residents of Teluk Pakedai and the subdistrict representatives. They have already done all that they can using limited resources in conducting this program. Hopefully by reading this thesis, the government will give more attention to facilities installment in villages using the program of PNPM Mandiri Pedesaan, by reserving enough source of funds to fulfill the needs of villages. Besides that, the researcher also hopes that the good relationship between the residents of Teluk Pakedai and the subdistrict representatives can be kept, so that further implementation of PNPM Mandiri Pedesaan at Teluk Pakedai Subdistrict will run smoother.

**Keywords:** National Community Empowerment Program, villages Development, Funding Resources.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua Negara di dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan itu sendiri merupakan suatu kondisi masyarakat karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau ke semua lapisan masyarakat hingga menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam penghasilan tiap-tiap orang serta kurang efektif dan efisiennya langkah-langkah pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan.

Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program

Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan, beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sector dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Masyarakat desa terutama dari rumah tangga miskin merupakan sasaran dari PNPM Mandiri Perdesaan sekaligus juga sebagai pelaku utama dari setiap tahapan pelaksanaan mandiri perdesaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya dari aparat dan konsultan ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya lebih

berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. Masalah kemiskinan dan kesenjangan pembangunan akan tetap menjadi tugas dan tanggung jawab utama pemerintah, maka perlu dilakukan berbagai usaha atau strategi untuk mengatasi masalah ini, bukan hanya pemerintah pusat yang harus bertanggung jawab dalam usaha pengentasan kemiskinan namun juga pemerintah daerah khususnya pemerintah Kubu Raya dan seluruh elemen masyarakat yang harus berperan serta didalamnya untuk mengentaskan kemiskinan.

Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung kemasyarakat sasaran, program ini cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat secara terorganisir dalam menanggulangi kemiskinan. Salah satu kecamatan yang menjadi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan adalah Kecamatan Teluk Pakedai. Adapun pemberian untuk membantu ekonomi masyarakat petani miskin khususnya di Teluk Pakedai yakni berupa tanggul pertanian, jalan rabat beton, pintu air dan lain-lain. dampak dari adanya pembangunan dari PNPM Mandiri Perdesaan tersebut keuntungannya dapat dirasakan oleh masyarakat ramai terutama

bagi para petani yang sebagian besar penduduk di Kecamatan Teluk Pakedai yakni sumber ekonominya berasal dari usaha pertanian.

### **KEBIJAKAN IMPLEMENTASI PNPM-MPd**

Anderson (dalam Islamy, 1979:4) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Mustopadidjaja (2002:5) kebijakan publik pada dasarnya adalah “suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan. Dalam kehidupan administrasi Negara, secara formal, keputusan ini lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan”. Maka kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang diambil pemerintah.

Sedangkan Menurut Micahel Howlet dan M.Ramesh (1995:11) proses

kebijakan publik terdiri dari lima tahapan antara lain :

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*) suatu proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*) proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Dalam derajat lain Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public* dalam Agustino (2006:139) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai: "Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya".

Implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya ditataran rendah. Elmore dkk (1999: 45). Sementara menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Widodo, 2007:87) mengatakan bahwa, "Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kegiatan-kegiatan".

Dalam proses implementasi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kegagalan. Sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Siagian (1990:225), dalam suatu implementasi terdapat kesenjangan antara penempatan kebijakan dan strategi pelaksanaannya.

Kegagalan itu akan terjadi pada pihak yang dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama atau kurang bekerja sama, atau dikarenakan implementor tidak sepenuhnya menguasai permasalahan.

Hartono (2002:18) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses yang memungkinkan tujuan-tujuan maupun sasaran-sasaran kebijakan Negara diwujudkan sebagai *outcome* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu implementasi juga harus mencakup penciptaan *policy delivery system* yang terdiri dari cara-cara atau sasaran tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

Anderson (1979:7) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu : *who is involved in policy implementation, the nature of administrative process, compliance with policy, and the effect of implementation on policy content and impact* (siapa yang mengimplementasikan kebijakan, hakekat dari proses administrasi, kepatuhan (kompilasi) kepada kebijakan, dan efek atau dampak dari implementasi (kebijakan). Keempat aspek tersebut menurut Anderson juga merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus, dimana kebijakan dibuat ketika dilakukan administrasi dan

diadministrasikan ketika dibuat. Setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana (*governmental unit*) yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai level birokrasi yang paling rendah.

Pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Sehubungan dengan program, Terry (dalam Tachjan, 2006:32) mengemukakan bahwa, “program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standard an budget”.

Menurut Teori yang mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, variabel-variabel yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

- (a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan  
Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
- (b) Sumber-sumber Kebijakan  
Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang

(*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

- (c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana.
- (d) Karakteristik badan-badan pelaksana Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
- (e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
- (f) Kecenderungan para pelaksana Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Budi Winarno, 2002:110).

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan

pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Keputusan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tanggal 30 juli 2007 tentang pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) menteri koordinasi bidang kesejahteraan rakyat selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan menurut Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- PNPM Mandiri Perdesaan Merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi Meningkatkan kesejahteraan & kesempatan kerja masyarakat miskin diperdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan Merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan

pengangguran melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar sosial ekonomi Meningkatkan kesejahteraan & kesempatan kerja masyarakat miskin diperdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan yakni meliputi :

- 1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin,
- 2) Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat,
- 3) Penambahan pemodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP). Penentuan pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah antar desa dengan menetapkan sejumlah kriteria yang meliputi aspek manfaat, berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan, dapat dikerjakan masyarakat, didukung sumber daya yang ada dan upaya pelestarian kegiatan.

Pendekatan dalam mencapai tujuan program ini yaitu dengan memperhatikan

prinsip-prinsip pengelolaan program adalah dengan pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

1. Menggunakan kecamatan sebagai lokasi program
2. Mengoposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan
3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipasi
4. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran kemandirian dan keberlanjutan.

Bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk masing-masing kecamatan ditetapkan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan, serta keuangan pusat dan daerah. Data tingkat kemiskinan setiap kecamatan/desa/kelurahan berdasarkan hasil pendataan program layanan sosial (PPLS 2011) dan PODES 2011.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif, yaitu dimana penulis menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan pada saat sekarang. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Pembangunan Infrastruktur Pintu Air Irigasi pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MPd) di Kecamatan Teluk Pakedai.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data proses pemilihan, Sajian data menyusun sekumpulan informasi, Verifikasi data merumuskan kesimpulan, hasil dari observasi dan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini: Kepala PNPM Mandiri Perdesaan Teluk Pakedai, Kepala Desa Teluk Pakedai, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Tiga orang Pegawai PNPM-MPd Kecamatan Teluk Pakedai

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempegaruhi keberhasilan implementasi Pembangunan Infrastruktur Pintu Air Irigasi PNPM-MPd Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai.

#### **A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Dalam Proses Implementasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan**

Keberhasilan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai dipengaruhi beberapa faktor menurut teori Van Meter dan Van Horn, antara lain; Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber-sumber Kebijakan, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Karakteristik badan-badan pelaksana, Kondisi ekonomi, sosial dan politik, Kecenderungan para pelaksana, yang akan peneliti uraikan satu-persatu dalam pembahasan ini.

#### **1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai**

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Terkait dengan tujuan khusus PNPM Mandiri Perdesaan di atas, tujuan khusus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Teluk Pakedai yaitu menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat kecamatan Teluk Pakedai membutuhkan sarana dan prasarana terkait dengan kegiatan pertanian yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kecamatan Teluk Pakedai, misalnya pintu

air irigasi, pipa irigasi dan infrastruktur pertaniannya lainnya.

penulis melakukan wawancara dengan salah seorang anggota TPK di Desa teluk Pakedai 1, Bapak Abd (38 Thn), *“semua kegiatan yang kita laksanakan bertujuan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan sebagian besar kegiatan yang kita laksanakan melibatkan masyarakat itu sendiri, kami dari TPK juga berasal dari masyarakat, jadi bisa dibidang dari masyarakat untuk masyarakat, namun dana dari pemerintah”*. Wawancara diatas menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Wawancara dengan seorang tokoh masyarakat, Bapak S (42 Thn) *“sebagian besar warga kita di sini berprofesi sebagai petani, dan masalah-masalah yang sering dihadapi warga kita adalah kurangnya pengairan pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan, jadi di sini kita memang membutuhkan pintu air irigasi dan pipa irigasi untuk mengatur jumlah air yang masuk ke areal pertanian, kami harap dengan adanya kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai ini bisa membantu kami mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan*

*kami”*. Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan masyarakat Kecamatan Teluk Pakedai yang cukup mendesak yaitu pembangunan dan pengadaan pintu air irigasi dan pipa irigasi untuk mengatur pengairan areal pertanian warga.

Selanjutnya mengenai ukuran dan tujuan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan penulis melakukan wawancara dengan kepala Desa teluk Pakedai Hulu, Bapak Mg (43 Thn), *“yang saya amati kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa kami program-program sangat bagus, masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini, misalnya pembangunan jalan rabat beton, pintu air hingga kegiatan sinpam pinjam permodalan yang dikelola ibu-ibu untuk modal usaha, saya kira tujuan PNPM Mandiri Perdesaan sangat mulia untuk membantu kami di sini yang mengalami kesulitan ekonomi”*.

Wawancara di atas menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan dalam PNPM Mandiri Perdesaan sangat membantu masyarakat yang ada di perdesaan. Dari hasil berbagai hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai sangat membantu masyarakat di perdesaan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan

melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya.

## 2. Sumber Daya Dalam Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai

Sumber daya dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan yaitu sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Permasalahan mengenai sumber daya pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai yaitu sumber daya keuangan yang terbatas untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Selain sumber daya manusia, sumber daya yang paling penting adalah sumber daya keuangan. Pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada prinsipnya semua proses terkait dengan penyaluran dan pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan, sedangkan kegiatan pengelolaan keuangan di desa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan.

Pendanaan kegiatan pembangunan rabat beton, pintu air irigasi, tanggul pertanian dan pipa irigasi di kecamatan Teluk Pakedai sepenuhnya mengharapkan sumber dana dari PNPM Mandiri

Perdesaan, untuk mengetahui hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu fasilitator, Bapak H (30 Thn), *“dalam perencanaan pembangunan kita memilah-milah kegiatan pembangunan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu karena menyangkut kebutuhan masyarakat. selanjutnya yang akan kita bangun yaitu tanggul pertanian yang sangat diperlukan saat musim penghujan tiba agar lahan pertanian tidak kebanjiran dan pipa irigasi agar saat musim kemarau lahan pertanian tetap dapat pasokan air yang cukup, sedangkan untu pintu air irigasi walaupun sebenarnya sangat penting untuk mengatur aliran air namun dapat dibangun setelah adanya tanggul pertanian dan pipa irigasi”*. Wawancara di atas menunjukkan bahwa dengan pendanaan yang terbatas tim fasilitator dan masyarakat Teluk pakedai memprioritaskan untuk membangun infrastruktur yang mendesak untuk segera dibangun yaitu rabat beton, tanggul pertanian dan pipa irigasi yang kesemuanya berkaitan erat untuk menunjang kegiatan pertanian di Kecamatan Teluk Pakedai.

Mengenai sumber daya keuangan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Teluk Pakedai, Bapak Y (38

Thn), *“selama ini pendanaan yang kami peroleh dan kami salurkan ke desa-desa jumlahnya bisa dibbilang ngepas, dalam artian jumlah dana yang cair sebenarnya tidak mencukupi untuk mendanai semua kegiatan PNPM yang ada di desa-desa, karena kebutuhan masyarakat desa cukup banyak, mulai dari pembangunan jalan, pintu air sampai kegiatan simpan pinjam ibu-ibu, jadi dana yang cair dari pusat kita bagi-bagi seadil mungkin, kita prioritaskan desa terjauh dari kecamatan yang tertinggal, kita harap Tim Pengelola Kegiatan di desa bisa memanfaatkan dana dengan sebaik mungkin”*.

Dari wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan masih kurang optimal, jumlah dana yang cair dan kebutuhan masyarakat belum seimbang. Dalam hal ini dibutuhkan kebijaksanaan dari tim pengelola kegiatan di desa untuk memprioritaskan kegiatan pembangunan yang mendesak.

### **3. Komunikasi Antar Organisasi Dalam Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai**

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan harus konsisten dan seragam (*consistency*

*and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Terkait dengan faktor komunikasi, dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai telah terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan dan warga masyarakat di desa-desa dalam setiap kegiatan mulai dari perencanaan hingga pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

Komunikasi yang efektif antara tim fasilitator dan masyarakat tentu sangat berguna dalam pembangunan rabat beton, pintu air irigasi, tanggul pertanian dan pipa irigasi di kecamatan teluk pakedai, untuk mengetahui hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak N (30 Thn), *“dalam setiap kegiatan apapun kita selalu melibatkan warga setempat untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi mereka. Termasuk dalam kegiatan pembangunan rabat beton, pintu air irigasi, tanggul pertanian dan pipa irigasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan langsung di lapangan. Bahkan masyarakat pula yang menentukan pembangunan infrastruktur mana yang mendesak segera dibangun karena menyangkut kebutuhan mereka, misalnya mengenai rabat beton yang sudah lama diidam-idamkan masyarakat karena untuk kelancaran akses jalan antar desa, tanggul pertanian untuk mencegah lahan pertanian*

*dari banjir, pipa irigasi untuk mengalirkan air ke lahan pertanian dan pintu air irigasi untuk mengatur jumlah air*". Wawancara di atas menunjukkan bahwa komunikasi dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai telah berjalan cukup efektif dan intensif antara tim fasilitator dan masyarakat.

#### **4. Karakteristik badan-badan pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai**

Karakteristik badan-badan pelaksana dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan antara lain Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pemantau, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai masalah karakteristik badan pelaksana kegiatan cukup berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Namun karakteristik-karakteristik badan pelaksana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai selama ini sudah cukup baik dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

Karakteristik badan pelaksana turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan

PNPM Mandiri Perdesaan, dalam hal ini pembangunan rabat beton, pintu air irigasi, tanggul pertanian dan pipa irigasi. Untuk mengetahui hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak N (54 Thn), *"karakteristik tim-tim kita di sini memang dirancang untuk dapat membaur bersama masyarakat, menampung segala aspirasi masyarakat dan bersama-sama memikirkan pembangunan-pembangunan yang perlu dilakukan di daerah setempat, intinya kita disini berusaha sedekat mungkin dengan masyarakat sehingga apapun keluhan dan kebutuhan masyarakat selama ini bisa sama-sama didiskusikan untuk dicari solusinya, misalnya dalam pembangunan rabat beton tim kita dan masyarakat bekerja sama mulai dari perencanaan sampai pembangunan, apalagi dalam proses pembangunannya memang masyarakat sendiri yang melaksanakannya dengan di bimbing dari tim kita, lalu pembangunan tanggul air dan pipa irigasi juga tim fasilitator bersama-sama masyarakat menentukan daerah mana yang akan dibangun terlebih dahulu, dan pembangunan pintu air irigasi juga demikian*". Wawancara di atas menunjukkan bahwa karakteristik badan pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan didesain sedemikian rupa sehingga dapat berkerja sama secara luwes dengan masyarakat setempat dalam setiap kegiatan

pembangunan, dalam hal ini pembangunan rabat beton, pintu air irigasi, tanggul pertanian dan pipa irigasi.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Teluk Pakedai Hulu, Bapak Mg (43 Thn), *“saya sebagai kepala desa cukup banyak terlibat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, misalnya melakukan kerja sama dengan desa lain, berkoordinasi dengan tim fasilitator, BPD dan TPK, kita siap mendukung apapun kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa kami”*.

Wawancara di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa turut berperan penting dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, Kepala Desa berkoordinasi dengan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Dari hasil berbagai wawancara di atas menunjukkan bahwa karakteristik badan/pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai.

##### **5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik di Kecamatan Teluk Pakedai**

Dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, faktor kondisi sosial, ekonomi dan politik selalu mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi

program jaminan kesehatan masyarakat di kelurahan sungai jawi dalam di pengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan politik. Faktor kondisi sosial, ekonomi dan politik di Kecamatan Teluk Pakedai sudah cukup baik, terutama kondisi sosial dan politik masyarakat yang aman dan terkendali, sedangkan kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Teluk Pakedai secara rata-rata memang termasuk kalangan menengah ke bawah, oleh karena itu dibutuhkan PNPM Mandiri Perdesaan untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

penulis melakukan wawancara dengan salah seorang anggota UPK di Desa Teluk Pakedai Hulu, bapak Ms (24 Thn), *“menurut pengamatan kami kondisi sosial dan politik masyarakat di sini sudah cukup baik, kalau kondisi ekonomi secara kasat mata dapat kita lihat masyarakat di sini sangat membutuhkan bantuan dan dukungan pemerintah untuk memperbaiki taraf ekonomi mereka, salah satunya dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan ini, kita bangun beberapa fasilitas yang sangat membantu untuk pertumbuhan ekonomi mereka terutama Pintu Air Irigasi untuk hasil perkebunan yang lebih baik”*

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa kondisi sosial dan politik sudah cukup baik namun kondisi ekonomi masyarakat masih rendah, dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan dapat membantu taraf ekonomi masyarakat

dengan membangun berbagai fasilitas untuk pertumbuhan ekonomi mereka.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan seorang tokoh masyarakat, Bapak S (42 Thn), "*seperti kita ketahui sebagian besar masyarakat kita berprofesi sebagai petani, jadi bisa dibidang taraf hidup warga di sini masih rendah, dan untuk menunjang hasil pertanian yang lebih baik banyak infrastruktur yang kita butuhkan, sedangkan kondisi sosial dan politik di sini saya nilai sudah cukup baik, dan kami siap menerima dan membantu pembangunan dalam bentuk apapun yang di selenggarakan pemerintah*".

Dari hasil berbagai wawancara di atas menunjukkan bahwa kondisi sosial dan politik masyarakat sudah cukup baik, namun kondisi ekonomi masyarakat masih belum merata sehingga PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Kecamatan Teluk Pakedai.

#### **6. Kecenderungan para pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai**

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai faktor kecenderungan para pelaksana kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan cukup berpengaruh, namun sebagian besar sikap pelaksana kegiatan PNPM di Kecamatan

Teluk Pakedai sudah baik dan sangat mendukung terselenggaranya kegiatan pembangunan dengan baik.

Sikap pelaksana adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan PNPM mandiri perdesaan di kecamatan teluk pakedai, dalam hal ini pembangunan rabat beton, pintu air irigasi, tanggul pertanian dan pipa irigasi, untuk mengetahui hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak N, (54 Thn), "*kalau menurut saya sikap pelaksana di lapangan dari tim kita sudah cukup baik, walaupun dengan dana yang ada kita prioritaskan pembangunan sarana tertentu terlebih dahulu, misalnya dalam pembangunan rabat beton petugas kita di lapangan tidak segan-segan turun langsung bersama masyarakat membangun jalan rabat beton, sama juga halnya dengan pembangunan tanggul pertanian, petugas kita di lapangan juga terlibat langsung bersama masyarakat, demikian juga saat pembangunan pipa irigasi dan pintu air petugas kita memberikan arahan dan turun tangan langsung dalam proses pembangunan*".

Wawancara di atas menunjukkan bahwa sikap pelaksana PNPM Mandiri perdesaan di kecamatan teluk pakedai telah cukup baik dalam mendukung setiap kegiatan pembangunan infrastruktur bersama masyarakat.

Wawancara dengan Kepala Teluk Pakedai Hulu, Bapak Mg (43 Thn), mengenai sikap pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Teluk Pakedai Hulu, "*sikap pelaksana PNPM mandiri perdesaan di desa parit baru ini saya lihat sudah cukup baik, dari tim-tim yang kita bentuk di desa kita pilih dari orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidang masing-masing dan semuanya sudah berusaha bekerja semaksimal mungkin, kita juga berkoordinasi dengan tim dari kecamatan dan kabupaten, kita tentunya terus berusaha memberikan kemampuan terbaik untuk pembangunan desa sendiri*".

Wawancara di atas menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan terpilih dari orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang masing-masing, dan semua pihak sudah bekerja seoptimal mungkin dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Teluk Pakedai Hulu.

## **PENUTUP**

1. Ukuran dan tujuan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai sangat membantu masyarakat di perdesaan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan melibatkan

masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya.

2. Sumber daya manusia dalam proses implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan teluk pakedai sudah cukup baik, namun sumber daya keuangan/pendanaan proyek masih terkendala beberapa hal, sehingga masih ada beberapa kegiatan pembangunan yang tersendat atau bahkan tertunda.
3. Komunikasi dan koordinasi antara organisasi atau dalam hal ini antar badan pelaksana telah berjalan dengan baik dalam rangka melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai.
4. Karakteristik badan/pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai.
5. Kondisi sosial dan politik masyarakat sudah cukup baik, namun kondisi ekonomi masyarakat masih belum merata sehingga PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Kecamatan Teluk Pakedai.
6. Sikap pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai siap mendukung dan bekerja maksimal dalam rangka pelaksanaan PNPM

Mandiri Perdesaan di Kecamatan Teluk Pakedai.

Mengenai pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, sehingga dapat turut membantu mengembangkan dan meningkatkan kembali kualitas pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang ada dalam pembahasan penelitian ini. Komunikasi dan sosialisasi pada masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan agar tetap terus dilakukan dengan intensif, sehingga segala sesuatu permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dapat dicarikan solusi dan diatasi bersama. Sumber daya manusia yang sudah ada terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk sumber daya pendanaan agar ditingkatkan kembali jumlah dana yang alokasikan dalam PNPM Mandiri Perdesaan, karena cukup banyak diperlukan pembangunan di desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Negara, Cetakan 12, Bumi Aksara, Jakarta: 2003.

Agustino Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung.

Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik* Yogyakarta: Media Presindo

Howlet Michael dan Ramesh M. 1995, *Studying Publik Policy, Policy Cyeles And Policy, Sub Sistem*, Oxford Universitas Press, Toronto.

Hartono. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.

Mustopadidjaja. AR, 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Siagian, P.Sondang, 1990, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : APII Bandung.

Widodo, Joko, 2007. *Analisis Kebijakan Public, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*. Bayumedia Publising, Malang.

## REFERENSI

### Buku-Buku:

Anderson, James, *Publik Policy-Making*, second edition, Holt, Rinehart and winston: 1979 dalam Islamy, irfan, *prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan*



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Mirdayanti  
NIM / Periode lulus : E21111109/III  
Tanggal Lulus : 25 September 2014  
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara  
E-mail address/ HP : [Mirda25@yahoo.com](mailto:Mirda25@yahoo.com) / 089674858487

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika\*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) DI KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui  
Pengelola Jurnal Publika  
2015

Dr. Erdi, M.Si  
NIP.196707272005011001

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 13 Agustus

Mirdayanti  
NIM. E21111109

Catatan :

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sostologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)